



ANALISIS KEBIJAKAN INTEGRASI DAPODIK DENGAN SISTEM PPDB ONLINE DI SMP NEGERI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Kasbijanto¹, Mohammad Syahidul Haq², Kaniati Amalia², Amrozi Khamidi³

¹²³Universitas Negeri Surabaya, Manajemen Pendidikan, Indonesia

Abstract

Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan terkait integrasi antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online di SMP Negeri yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Integrasi tersebut dipandang krusial guna membangun sistem pendidikan yang lebih terbuka, efektif, dan bertanggung jawab yang ditopang oleh data yang akurat. Penelitian ini mengkaji sejumlah sumber literatur, regulasi, dan dokumen kebijakan yang berkaitan, guna menggali tantangan, peluang, serta konsekuensi dari kebijakan tersebut terhadap pelaksanaan PPDB online. Hasil kajian menunjukkan bahwa walaupun penyatuhan data antara Dapodik dan PPDB online dapat memperkuat keabsahan data, meningkatkan akurasi data serta mempercepat proses seleksi, implementasinya masih menghadapi hambatan teknis, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta ketimpangan fasilitas di berbagai sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar pihak terkait, penguatan kemampuan teknis operator sekolah, dan penyesuaian regulasi yang responsif terhadap kondisi setempat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Basic Education Data, Online PPDB, Education Policy

Abstract

This study is a literature review aimed at evaluating the policy related to the integration of the Basic Education Data (Dapodik) with the online New Student Admissions (PPDB) system in public junior high schools under the auspices of the Bojonegoro Regency Education Office. This integration is considered crucial for building a more open, effective, and accountable education system supported by accurate data. This study examines a number of related literature sources, regulations, and policy documents to explore the challenges, opportunities, and consequences of this policy on the implementation of online PPDB. The results of the study indicate that although the integration of data between Dapodik and online PPDB can strengthen data validity, improve data accuracy, and accelerate the selection process, its implementation still faces technical obstacles, limited human resource capacity, and disparities in facilities across schools. Therefore, it is necessary to improve coordination between relevant parties, strengthen the technical capabilities of school operators, and

Submitted: 31-09-2025 Approved: 31-10-2025. Published: 05-11-2025

Corresponding author's e-mail: 24010845157@mhs.unesa.ac.id

ISSN: Print 2722-1504 | ONLINE 2721-1002

<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/jpg/index>

adapt regulations responsive to local conditions. The results of this study are expected to contribute as considerations in the development of policies for a more integrated and sustainable education system.

Keywords: Data Pokok Pendidikan, PPDB Online, Kebijakan Pendidikan

INTRODUCTION

Digitalisasi di bidang pendidikan Indonesia mengalami perkembangan signifikan seiring meningkatnya kebutuhan akan sistem yang transparan, efisien, dan berbasis data akurat. Salah satu langkah strategis pemerintah dalam mendukung hal ini adalah melalui pemanfaatan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang berfungsi sebagai basis utama dalam penyediaan data pendidikan nasional. Dapodik berperan penting dalam proses pengambilan keputusan, distribusi anggaran, hingga evaluasi kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Implementasi merupakan salah satu fungsi manajemen sebagai suatu kegiatan menggerakkan organisasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengarahan, bimbingan, komunikasi, dan koordinasi sehingga kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana secara efektif (KMS Badaruddin, 2022). Sementara itu, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis daring telah diimplementasikan guna mendukung proses seleksi peserta didik yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, pelaksanaan kedua sistem ini, terutama di lingkup SMP Negeri wilayah Kabupaten Bojonegoro, belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal. Permasalahan yang timbul antara lain adalah ketidaksesuaian data antara Dapodik dan PPDB online, yang dapat memicu masalah teknis maupun administratif seperti duplikasi data, informasi yang tidak sinkron, dan hambatan dalam proses penerimaan siswa baru. Dengan demikian, diperlukan kajian mendalam terhadap kebijakan integrasi antara Dapodik dan sistem PPDB online, khususnya dalam konteks daerah, guna mengidentifikasi hambatan yang ada serta merumuskan solusi yang relevan dan aplikatif. Identifikasi masalah masih ditemukan kendala dalam proses sinkronisasi antara sistem Dapodik dengan platform PPDB online, pemanfaatan data dari Dapodik sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan PPDB belum berjalan secara maksimal, terdapat ketimpangan dalam infrastruktur teknologi serta kemampuan sumber daya manusia antar sekolah dalam mendukung integrasi sistem, belum tersedia pedoman teknis atau kebijakan operasional yang benar-benar terintegrasi di tingkat daerah untuk mendukung sinergi Dapodik dan PPDB online. Batasan masalah penelitian ini difokuskan pada studi kepustakaan mengenai kebijakan integrasi antara Dapodik dan PPDB online yang berlaku di SMP Negeri yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Fokus utama penelitian mencakup aspek kebijakan, tantangan implementasi, serta strategi penguatan integrasi sistem berdasarkan data literatur dan ketentuan regulasi yang relevan. Tujuan penelitian mengkaji kebijakan integrasi antara Dapodik dan sistem PPDB online di lingkup SMP Negeri Kabupaten Bojonegoro, mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi dalam penerapan integrasi sistem tersebut, dan merumuskan strategi berbasis literatur yang dapat mendukung optimalisasi kebijakan integrasi tersebut. Manfaat penelitian secara teoritis menambah khazanah keilmuan dalam bidang kebijakan pendidikan, khususnya terkait pemanfaatan

sistem informasi terintegrasi, secara praktis memberikan panduan bagi pemangku kebijakan pendidikan di tingkat daerah serta pihak sekolah dalam meningkatkan integrasi data antara Dapodik dan PPDB online, dan dalam aspek kebijakan menyediakan masukan berbasis kajian literatur untuk perumusan kebijakan pendidikan yang lebih kontekstual, efisien, dan berorientasi pada data. Asumsi penelitian yaitu sistem Dapodik dan PPDB online dirancang untuk saling terhubung guna mendukung pengelolaan pendidikan yang lebih efektif, literatur dan regulasi yang digunakan dalam penelitian ini dianggap mencerminkan kondisi faktual dan dapat dijadikan dasar analisis yang sah, serta keberhasilan integrasi kebijakan sangat tergantung pada kesiapan teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan kebijakan yang fleksibel.

Teknologi informasi menyentuh berbagai aspek di sektor pemerintahan dan membuat semuanya menjadi lebih mudah sehingga data yang diperoleh dapat diproses lebih cepat dan semakin menghemat waktu atau lebih efisien (Andri Wahyudi, Andre Himawan & Kinanti Trisna Saputri, 2022). Aplikasi Dapodik tidak hanya membantu proses pendataan lebih cepat dan akurat, tetapi juga membantu membuat sistem lebih terorganisasi (Nadela Annggela & Ria Andryani, 2022). Memilih aplikasi berbasis internet sebagai alat komunikasi adalah pilihan yang cerdas karena aplikasi tersebut dapat mengirimkan informasi atau pesan kepada pengguna di mana pun mereka berada, tanpa terbatas oleh wilayah atau Lokasi ((Wahyu Gunawan, Hendri, Baginda Oloan Lubis, Dony Oscar & Agus Salim, 2024). Data merupakan materi pokok sebagai acuan mobilisasi dari suatu lembaga, baik dalam melangkah ataupun membuat peraturan, dan seiring berkembangnya teknologi, semakin banyak ruang untuk menyimpan data secara online (Dedy Tjahjono, 2022). Sistem Informasi Dapodik merupakan suatu proses pengumpulan dan pengelolaan data yang telah terverifikasi dan terintegrasi, yang dapat dimanfaatkan oleh semua jenjang satuan pendidikan. Dengan dapodik data akan terorganisir dan terintegrasi (Endang Handayani, Rusi Rusmiati Aliyyah, Rusli AbdulGani, 2024). Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dibentuk untuk menyediakan informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manajemen didalam organisasi (Fadli Hasan, Dian Hidayati, 2023). Dapodik merupakan bagian dari Program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif untuk melaksanakan perencanaan pendidikan, maupun untuk melaksanaan program-program pendidikan secara tepat sasaran (Siti Safa'ah, Furtasan Ali Yusuf & Ade Manggala Hardianto, 2023). Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah suatu sistem informasi pendataan yang terintegrasi memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan terus menerus diperbaharui secara online, yang dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini telah berubah nomenklatur menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Informasi yang tercakup meliputi data siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitas sekolah, serta aspek kelembagaan. Fungsi utama dari sistem ini adalah sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan pendidikan, penyaluran bantuan, hingga perencanaan anggaran.

Sistem informasi Dapodik ini setiap tahun dilakukan pembaruan dan perbaikan (Nur Ain Ismail , Lillyan Hadjaratie & Moh. Ramdhan Arif Kaluku, 2022). Kualitas informasi data menunjukkan kualitas produk yang dihasilkan oleh sistem informasi. Kualitas informasi diukur melalui indikator: kelengkapan; ketepatan waktu; relevansi; keakuratan dan format penyajian (Novita Lisa, 2023). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan kebijakan tata kelola data yang bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan daerah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data, sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) digunakan sebagai instrumen utama dalam menghimpun serta mengelola informasi pendidikan. Pengintegrasian Dapodik dalam kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa data yang diperoleh memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses perencanaan maupun pengambilan Keputusan, selain itu sistem Dapodik dirancang untuk menjamin keakuratan serta keabsahan data pendidikan. Kualitas dan pembaruan data dalam Dapodik sangat menentukan efektivitas pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy) di sektor pendidikan.

Pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dunia Pendidikan Indonesia, masih terjadi kesenjangan di beberapa daerah di Indonesia dalam memperoleh akses pendidikan yang layak (Kadek Dede Junaedy, 2022). PPDB merupakan sistem yang mengatur persyaratan dan pelaksanaan penerimaan siswa yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru mulai menggunakan metode zonasi demi pemerataan pendidikan di Indonesia (Satrio Muhammad Alif, Nisya Kartika & Andri Hernandi, 2022). Sistem PPDB Online merupakan sistem seleksi siswa baru yang diselenggarakan secara online, dengan tujuan utama menciptakan proses penerimaan yang adil, efisien, dan transparan. Sistem ini mendukung pelaksanaan reformasi dalam pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan. Manajemen peserta didik merupakan salah satu komponen manajemen pendidikan. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan para anggota organisasi dan penggunaan berbagai sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan (Indra Budi Setiawan & Husaini Usman, 2022). Manajemen peserta didik sangat penting keberadaanya dalam penyelenggaraan suatu lembaga pendidikan. Sehingga untuk meningkatkannya harus dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik baru, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dan evaluasi penerimaan peserta didik baru (Ni Gusti Ayu Sanggrayani Astadi, 2022). Manajemen peserta didik berperan dalam mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik. Implementasi kebijakan pendaftaran PPDB online berjalan sesuai aturan yang berlaku dan aspek-aspek manajemen. Ketentuan pelaksanaan PPDB diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang menekankan pada prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas bagi setiap warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat 1 yang berbunyi Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu kebijakan pendidikan yang diadakan oleh pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut ialah kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diselenggarakan secara daring (Tara Mitha Rizki & Mohammad Ridwan, 2023). Dalam pelaksanaannya, PPDB online (daring) sangat bergantung pada keakuratan data dari calon peserta didik dan lembaga pendidikan, yang sebagian besar bersumber dari sistem Dapodik. Pemanfaatan sistem informasi pada data pendidikan dilakukan guna merealisasikan perencanaan program pendidikan yang tepat sasaran (nayatul Izzati Diana Yusuf, Budi Susetyo & La Ode Abdul Rahman, 2023). Untuk melaksanakan perencanaan pendidikan, maupun untuk melaksanaan program-program pendidikan secara tepat sasaran, dibutuhkan data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel dan terus up to date (Yanto & Muhamad Hamdi, 2024). Oleh sebab itu, keselarasan dan keterkaitan data antara kedua sistem sangat krusial agar tidak menimbulkan hambatan teknis maupun administratif dalam proses penerimaan. Integrasi Sistem Informasi Pendidikan merujuk pada penggabungan antara dua atau lebih sistem berbeda agar dapat berfungsi secara terpadu dan saling mendukung. Di dunia pendidikan, penyatuhan antara Dapodik dan PPDB online diharapkan dapat menciptakan sistem digital yang efisien, terhubung, dan mampu mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Keberhasilan integrasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia di sekolah, serta dukungan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lapangan. Jika integrasi tidak berjalan optimal, hal ini dapat menimbulkan tumpang tindih informasi, kesalahan dalam verifikasi data, dan potensi penyalahgunaan sistem.

Pendidikan dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi tingkat kecerdasan manusia (Annas Rifai & Imelda, 2024). Sebagai penduduk Indonesia, akses terhadap pendidikan merupakan hak setiap warga negara berdasarkan UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warganya dapat menikmati hak pendidikan demi meningkatkan kualitas kehidupan suatu bangsa di masa yang akan datang. Sebagaimana target dari rencana pendidikan yang diimplementasikan oleh pemerintah, disamping itu target pemerataan dan perluasan jangkauan pendidikan, relevansi dan peningkatan kualitas pendidikan, maka target selanjutnya yang sangat penting adalah tentang pengelolaan sistem pendidikan (Zenni Mahmud, 2022). Tidak semua wilayah memiliki pemerataan dalam pendidikannya, oleh karena itu diperlukan adanya perhatian khusus oleh pemerintah terhadap wilayah yang dinilai kurang dalam pemerataan pendidikannya (Rossa Amelia Manik & Atik Ariesta, 2023). Proses penerimaan di sekolah dipengaruhi oleh peraturan

negara (Noblana Adib, Lilik Rofiqoh, Sugeng Riyadi, 2023), dalam akses pemerataan ada dua aspek yang perlu diperhatikan, pertama, persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yaitu akses pendidikan bisa dinikmati oleh semua penduduk yang berusia sekolah dan Kedua, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat yaitu pendidikan bisa diakses oleh antar suku, agama dan kelompok secara bersama-sama (Putu Ronny Angga Mahendra, 2022). Proses implementasi kebijakan menjadi penentu akhir yang paling utama atas keseluruhan penyusunan kebijakan, termasuk dalam bidang pendidikan (Mahmud Mahmud, Fadlilah, Tuti Indriyani, Fransisko Chaniago, M Fadly Habibi, & Des Winanda Rosalia, 2024). Kebijakan pendidikan berbasis data merupakan pendekatan dalam penyusunan regulasi dan program pendidikan yang mengandalkan informasi yang akurat, terkini, dan terpercaya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terutama dalam pengelolaan sektor pendidikan. Agar hasil olah datanya dapat dijadikan landasan dalam mengambil kebijakan sekolah kedepan (Pandri Ferdias, Nusyirwa & Dina Eka Nurvazly, 2022), maka perlu adanya peningkatan pengetahuan, teknologi dalam pengolahan data yang lebih tinggi dihasilkan dari kegiatan Pelatihan Olah Data Statistik Bagi Operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Sekolah. Pemerintah mendorong penerapan sistem digital dalam mendukung kebijakan pendidikan yang adaptif dan berbasis kinerja. Tanpa dasar data yang kuat, kebijakan yang diambil cenderung spekulatif dan berisiko tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, penggabungan antara Dapodik dan sistem PPDB online merupakan langkah penting dalam memperkuat efektivitas kebijakan pendidikan nasional maupun daerah. Studi terdahulu beberapa penelitian sebelumnya, seperti dari Yanto dan Muhamad Hamdi (2024) mengungkap bahwa upaya integrasi telah dilakukan melalui konsolidasi langsung antar pengelola data, verifikasi berkala, dan klasifikasi jenis verifikasi data. Namun, terdapat kendala yang signifikan, seperti keterbatasan infrastruktur internet, kinerja perangkat keras yang kurang optimal, atribut data yang tidak lengkap, serta proses pembaruan data yang lambat. Solusi yang diusulkan meliputi pengembangan sistem pengumpulan data yang terintegrasi untuk mendukung mutasi siswa dan penyusunan SOP standar untuk pengelolaan data. Oleh karena itu, langkah strategis tambahan diperlukan untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas integrasi data. Kualitas data yang lebih baik sangat penting untuk mendukung penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan berbasis bukti yang lebih terarah. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan teknis pada tingkat sekolah. Di sisi lain, ketidakselarasannya data antara kedua sistem kerap menjadi sumber masalah dalam proses seleksi peserta didik baru, yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan

METHOD

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif guna mengeksplorasi secara mendalam kebijakan integrasi antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan sistem

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online di lingkungan SMP Negeri Kabupaten Bojonegoro, dengan menggunakan teori analisis William Dunn. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi aktual, pelaksanaan kebijakan, serta hambatan yang muncul dalam praktik. Data diperoleh melalui kajian pustaka yang mencakup regulasi pendidikan, dokumen resmi kebijakan, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai data sekunder yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen peraturan seperti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai Dapodik dan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru mengenai sistem PPDB Online, serta sumber literatur lain yang berkaitan dengan digitalisasi sistem pendidikan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi, untuk menemukan pola, tema utama, dan permasalahan yang terkait dalam proses integrasi sistem. Fokus analisis meliputi Perumusan Masalah (Problem Structuring), Peramalan (Forecasting), Rekomendasi Kebijakan (Recommendation), Pemantauan (Monitoring), Evaluasi (Evaluation), dan Pemilihan Kebijakan (Policy Choice). Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen dan hasil penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh informasi yang obyektif dan menyeluruh. Hasil analisis ini kemudian disajikan secara naratif agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang diteliti.

RESULTS AND DISCUSSION

RESEARCH FINDINGS

1. Perumusan Masalah (Problem Structuring)

Permasalahan kebijakan utama yang melatarbelakangi integrasi sistem Dapodik dengan PPDB online di tingkat SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro adalah ketidakefisienan serta potensi ketidakakuratan data dalam proses penerimaan peserta didik baru. Sistem yang berjalan secara terpisah menyebabkan terjadinya pengulangan input data, meningkatkan kemungkinan kesalahan karena proses manual, dan memperlambat validasi data calon siswa. Di samping itu, minimnya kemampuan sistem untuk saling terhubung menghambat pemanfaatan data secara menyeluruh sebagaimana yang diamanatkan dalam kebijakan Satu Data Pendidikan. Oleh karena itu, ketidakefisienan dan kesalahan data dalam PPDB menjadi alasan mendasar perlunya kebijakan integrasi. Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 secara tegas mengarahkan agar data pendidikan bersifat terintegrasi, akurat, dan mudah diakses, sehingga secara langsung menjawab tantangan terkait keterpaduan data.

2. Peramalan (Forecasting)

Apabila integrasi antara sistem Dapodik dan PPDB online dapat diterapkan secara maksimal di Kabupaten Bojonegoro, maka sejumlah manfaat dapat dirasakan, antara lain:

a. Dampak Positif:

Pelaksanaan PPDB menjadi lebih efisien serta minim potensi kecurangan.

1. Akses ke jenjang pendidikan SMP menjadi lebih merata melalui mekanisme domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur mutasi.
2. Pemerintah daerah memiliki kemudahan dalam merancang kebijakan terkait domisili dan distribusi kuota siswa secara lebih tepat.
- b. Dampak Negatif Jika Tidak Diantisipasi:
 1. Praktik perpindahan domisili palsu diperkirakan masih akan banyak terjadi.
 2. Tingkat kepercayaan publik terhadap sistem PPDB dapat menurun.
 3. Kesenjangan antara SMP negeri unggulan dan sekolah yang kurang diminati akan semakin besar.

3. Rekomendasi Kebijakan (Recommendation)

Adapun usulan kebijakan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro mencakup hal-hal berikut:

1. Mengembangkan sistem PPDB online tingkat daerah yang terintegrasi secara otomatis dengan data dari Dapodik.
2. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bagi operator Dapodik dan panitia PPDB sekolah, terutama di wilayah pedesaan atau yang belum terjangkau layanan optimal.
3. Menyusun prosedur operasional standar (SOP) serta petunjuk teknis PPDB yang selaras dengan data Dapodik dan mudah diterapkan.
4. Membentuk tim verifikasi dan audit data yang melibatkan unsur sekolah, dinas pendidikan, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
5. Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sekolah-sekolah yang masih mengalami keterbatasan akses atau infrastruktur digital.

4. Pemilihan Kebijakan (Policy Choice)

- a. Pilihan terbaik adalah menerapkan kebijakan integratif berbasis data real-time melalui sinkronisasi penuh Dapodik dan sistem PPDB online yang sejalan dengan arah kebijakan nasional dan dapat disesuaikan dengan konteks lokal Bojonegoro, dengan alasan berikut:
- b. Lebih efektif karena pelaksanaan proses menjadi lebih cepat serta hasilnya lebih akurat.
- c. Hemat sumber daya karena tidak diperlukan lagi entri data secara manual, sehingga menghemat waktu dan biaya.
- d. Seleksi lebih tepat karena proses seleksi didasarkan pada data valid seperti data domisili Dukcapil yang langsung terhubung dengan Dapodik.
- e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat karena validitas data yang digunakan menjamin transparansi dan keadilan dalam proses penerimaan siswa.

Alternatif kebijakan tambahan:

1. Mengharuskan validasi alamat tempat tinggal calon siswa dilakukan dengan menggunakan informasi dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta koordinat lokasi tempat tinggal, yang bersumber dari data kependudukan dan terintegrasi

- dengan sistem informasi geografis (GIS) milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
2. Menjalankan program percontohan penerapan integrasi menyeluruh antara sistem Dapodik dan PPDB Online pada 5 hingga 10 SMP Negeri yang dipilih berdasarkan keragaman letak geografis dan tingkat kesiapan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Melalui strategi yang terstruktur, berupaya untuk mengidentifikasi potensi hambatan sedini mungkin dan memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan dapat berjalan optimal.Komunikasi Kebijakan

1. Pemantauan (Monitoring)

Pemantauan terhadap pelaksanaan integrasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Pemantauan Sistem Secara Rutin

Langkah ini mencakup pengecekan berkala untuk memastikan bahwa proses penarikan data dari Dapodik ke sistem PPDB Online berjalan dengan benar tanpa kendala. Selain itu, kesesuaian atribut data penting siswa seperti Nama, NISN, NIK, Jenis Kelamin, Kelahiran, Alamat dan Koordinat diperiksa secara menyeluruh, serta dilakukan evaluasi terhadap log aktivitas integrasi secara teratur.

- b. Pemeriksaan dan Validasi Data

Dilakukan peninjauan internal untuk membandingkan data siswa yang muncul di sistem PPDB Online dengan data resmi di Dapodik masing-masing sekolah. Pemeriksaan ulang terhadap informasi siswa baru juga dilakukan guna mencegah terjadinya data ganda atau kesalahan entri.

- c. Sinergi dengan Operator Sekolah

Dibentuk ruang komunikasi antara operator sistem Dapodik dan PPDB agar koordinasi tetap terjaga. Selain itu, pelatihan teknis juga diberikan untuk meningkatkan pemahaman operator sekolah terhadap proses integrasi dan cara mengatasi masalah yang mungkin muncul.

- d. Pelaporan dan Evaluasi Berkala

Penyusunan laporan secara rutin, baik mingguan maupun bulanan, dilakukan guna memantau perkembangan integrasi. Evaluasi terhadap hambatan teknis serta tindakan korektif juga menjadi bagian dari proses ini untuk memastikan keberlanjutan sistem berjalan optimal.

- e. Pemanfaatan Dashboard Pemantauan

Pembuatan dashboard pemantauan dengan data integrasi real-time membantu berbagai pihak termasuk kepala sekolah, pengawas, dan Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan terhadap status dan kemajuan proses integrasi data.

- f. Tindakan Cepat atas Masalah yang Muncul

Dibentuk tim pendukung teknis atau helpdesk untuk menangani keluhan dan gangguan dalam integrasi sistem. Prosedur pelaporan permasalahan teknis juga disusun dengan jelas agar respons bisa dilakukan dengan cepat dan tepat.

g. Pengumpulan Masukan dari Pihak Terkait

Dilakukan penggalian pendapat dan saran dari berbagai pemangku kepentingan seperti sekolah, siswa, maupun orang tua mengenai akurasi data dan kemudahan sistem PPDB. Informasi ini kemudian digunakan untuk menyempurnakan sistem ke depannya agar lebih responsif dan efektif.

2. Evaluasi (Evaluation)

Kriteria evaluasi yang digunakan mencakup beberapa aspek berikut:

- a. Tingkat keberhasilan integrasi data antara Dapodik dan sistem PPDB.
- b. Durasi waktu yang dibutuhkan dalam proses verifikasi data calon peserta didik baru.
- c. Tingkat akurasi data calon peserta didik baru.
- d. Derajat kesesuaian distribusi siswa dengan prinsip domisili yang telah ditetapkan.
- e. Jumlah laporan atau keluhan dari masyarakat mengenai pelaksanaan PPDB.

CONCLUSION

1. Penerapan integrasi antara sistem Dapodik dan platform PPDB online di Kabupaten Bojonegoro menjadi langkah yang sangat penting untuk mengatasi berbagai persoalan seperti ketidakefisienan, pengulangan entri data, dan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses seleksi peserta didik baru. Masalah ini muncul karena kurangnya keterhubungan antar sistem, yang berdampak pada lambatnya proses validasi serta kurang akuratnya data secara waktunya. Mengacu pada ketentuan dalam Permendikbudristek No. 31 Tahun 2022 dan Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025, kebijakan integrasi ini dipandang sebagai solusi yang tepat dalam rangka menciptakan sistem PPDB yang lebih transparan, adil, dan berbasis data yang valid.
2. Prediksi ke depan menunjukkan bahwa jika integrasi ini dilaksanakan dengan maksimal, maka akan tercipta efisiensi dalam pelaksanaan PPDB, pemerataan akses pendidikan antar wilayah, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi. Namun, jika integrasi tidak dilakukan, maka potensi manipulasi data dan ketimpangan akses terhadap pendidikan akan tetap menjadi masalah yang berkelanjutan.
3. Usulan kebijakan yang diberikan menitikberatkan pada penguatan sistem informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penyusunan prosedur operasional yang komprehensif, koordinasi antarlembaga, serta perbaikan infrastruktur digital di satuan pendidikan. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi disarankan dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan sistem pelaporan daring, monitoring sekolah, serta pelibatan masyarakat. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari tingkat kecepatan dan keakuratan verifikasi data serta menurunnya jumlah pengaduan yang masuk.

4. Kebijakan yang paling tepat untuk diterapkan adalah pembangunan sistem yang sepenuhnya terintegrasi dengan Dapodik, didukung dengan proyek percontohan pada beberapa sekolah dan penerapan verifikasi domisili berbasis data kependudukan (NIK) dan lokasi geografis (GIS). Langkah ini mendukung transformasi digital pendidikan secara nasional dan tetap dapat disesuaikan dengan konteks lokal yang ada di Bojonegoro.

BIBLIOGRAPHY

- Adib, N., Rofiqoh, L., & Sugeng, R. (2023). The Cultural Production of the Educated Person: A Case Study the New Student Admision in Pangkalpinang Bangka. *Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan*, 8(2), 240-250. <https://doi.org/10.25217/ji.v8i2.3333>
- Alif, S.M., Kartika, N., & Hernandi, A. (2022). Zoning Determination Analysis of New Student Admissions Using N-Dimensional Euclidean Distance. *Jurnal Geografi Gea*, 22 (2), 2549-7529. <https://ejurnal.upi.edu/index.php/gea/article/view/34998/0>
- Anggela, N., & Andryani, R. (2022). Quality Analysis of Dapodik Application Systems in the Department of Education in the City of Palembang Using Delone and Mclean Methods. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5 (3), 2615-3076. <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/6416>
- Badaruddin, KMS. (2022). Implementation Of Admission of New Students Zoning System Perspective of Islamic Education Management Theory At SMAN 1 Rambutan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11 (02), 2614-8846. <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/4450>
- Churiyah, I. (2022). Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMK PGRI 1 Kediri. <https://etheses.iainkediri.ac.id/4581/>
- Ferdias, P., Nusyirwa, & Nurvazly, D.E. (2022). Pelatihan Olah Data Statistik Bagi Operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung. *BUGUH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 (3), 2808-1412. <https://pdfs.semanticscholar.org/0268/a36b06e8cdb907c5fd3a632059a29f0f89a8.pdf>
- Gunawan, W., Hendri., Lubis, B.O., Oscar, D., & Salim, A. (2024). Analisis Pengukuran Usability Aplikasi DAPODIK Kabupaten Karawang Dengan Metode Use Questionnaire dan IPA. *JTSI: Jurnal Teknologi Sistem Informasi*, 5 (1), 119-132. <https://doi.org/10.35957/jtsi.v5i1.7610>
- Handayani, E., Aliyyah, R.R., & Gani, R.A. (2024). Penerapan Sistem Data Pokok Pendidikan Pada Sekolah Dasar. *Karimah Tauhid*, 3 (3), 2963-590X. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12226>
- Hasan, F., & Hidayati, D. (2023). Strategi Inovatif Kepala Sekolah Dalam Pemenuhan Honorarium Guru Terdaftar Dapodik Di Sekolah Swasta. *Manajemen Pendidikan*, 18 (1), 1907-4034. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jmp/article/view/21315>
- Ismail, N.A., Hadjaratie, L., & Kaluku, M.R.A. (2022). Evaluasi Penerimaan Sistem Informasi Dapodik Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM) Pada Sekolah Dasar Kabupaten Bone Bolango. *Journal of System and Information Technology*, 2 (2) 2827-7864. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/diffusion/article/view/15586>
- Junaedy, I. D. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Denpasar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7 (2), 114-118. <https://doi.org/10.22225/pi.7.2.2022.114-118>

- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 Tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Serta Kursus Dan Pelatihan
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Nomor 422.1/1724/KEP/412.201/2025 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Perimaan Murid Baru (SPMB) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bojonegoro Tahun Pelajaran 2025/2026. <https://dinaspendidikan.bojonegorokab.go.id/berita/baca/215>
- Lisa, N. (2023). Analisis Pengaruh Kualitas Sistem Dan Kualitas Informasi Terhadap Manfaat Bersih Melalui Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pada SMP Se-Kabupaten Manggarai. <https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/4274/>
- Mahendra, P.R.A. (2022). Pelaksanaan Sistem Zonasi PPDB Terhadap Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Keadilan Di SMP Negeri Kota Denpasar Tahun 2021. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8 (2), 2356-4164. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51438>
- Mahmud, M., Fadlilah, F., Indriyani, T., Chaniago, F., & Habibi, M. F. (2024). Kebijakan Sistem Zonasi: Implementasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 7 (1), 149-161. <https://journal-fip.um.ac.id/index.php/jamp/article/view/1417>
- Mahmud, Z. (2022). Implementasi Manajemen Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMP Muhammadiyah 4 Metro Tahun Pelajaran 2021/2022. <http://eprints.ummetro.ac.id/2230/>
- Manik, R.A., & Ariesta, A. (2023). Data Mining Untuk Klasterisasi Provinsi Di Indonesia Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Nasional. *Jurnal TICOM: Technology of Information and Communication*, 11 (3), 159-164. <https://doi.org/10.70309/ticom.v11i3.115>
- Mitha Rizki, T., & Ridwan, M. (2023). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Medan. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 14(2), 205-220. <https://doi.org/10.23960/administratio.v14i2.408>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Bar
- Rifai, A., & Imelda. (2024). Analysis Of Community Sentiment Towards The Implementation Of Zoning In New Student Admissions (PPDB) Using The Support Vector Machine (SVM) Algorithm. *Moneter : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12 (1), 91-99. <https://doi.org/10.32832/moneter.v12i1.720>